

PEMEKARAN WILAYAH SEBAGAI SOLUSI KETIMPANGAN RUANG DI KABUPATEN BEKASI: STUDI LITERATUR

Anang Suherman¹, Enok Maryani²

^{1,2}Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia
anangsuherman@upi.edu, enokmaryani@upi.edu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pembangunan ruang di Kabupaten Bekasi serta mengevaluasi potensi pemekaran wilayah sebagai solusi untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Ketimpangan yang signifikan antara wilayah maju (seperti Cikarang dan Tambun) dengan wilayah tertinggal (seperti Babelan dan Bojongmangu) mempengaruhi kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan data statistik. Teknik analisis yang dilakukan melibatkan identifikasi dan sintesis temuan utama dari literatur terkait, untuk memahami penyebab ketimpangan dan mengevaluasi efektivitas pemekaran wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran wilayah dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memberdayakan masyarakat lokal. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, kesiapan fiskal, dan manajemen risiko sosial. Penelitian ini juga merekomendasikan penguatan alokasi anggaran bagi wilayah tertinggal, pelatihan sumber daya manusia lokal, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan pasca pemekaran.

Kata kunci: Ketimpangan ruang, pemekaran wilayah, Kabupaten Bekasi, desentralisasi, pembangunan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze spatial development inequality in Bekasi Regency and evaluate the potential for regional expansion as a solution to reduce this inequality. The significant inequality between developed areas (such as Cikarang and Tambun) and underdeveloped areas (such as Babelan and Bojongmangu) affects the quality of public services, infrastructure development, and community welfare. The research method used is a literature study, with data collection techniques in the form of document analysis from various sources such as scientific journals, government reports, and statistical data. The analysis technique involved identifying and synthesizing key findings from relevant literature, to understand the causes of inequality and evaluate the effectiveness of regional expansion. The results show that regional expansion can be a strategic solution to improve the efficiency of public services, accelerate infrastructure development, and empower local communities. However, the success of this policy is highly dependent on careful planning, fiscal preparedness, and social risk management. This study also recommends strengthening budget allocations for underdeveloped regions, training local human resources, and involving communities in planning as strategic steps to reduce post-division inequality.

Keywords: Spatial inequality, territorial expansion, Bekasi Regency, decentralization, sustainable development.

Dikirim: 29-11-2024; Disetujui: 07-12-2024; Diterbitkan: 30-12-2024

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah merupakan salah satu kebijakan strategis yang sering diusulkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, sehingga akses terhadap layanan publik menjadi lebih mudah dan efisien. Menurut Badan Kebijakan Fiskal (2013), pemekaran wilayah dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendekatkan pelayanan publik yang sebelumnya sulit dijangkau.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ombudsman RI (2024) menunjukkan bahwa pemekaran wilayah dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan lokal, memperkuat pengelolaan sumber daya, dan memberikan kesempatan bagi wilayah baru untuk memaksimalkan potensi ekonominya. Dengan adanya pemekaran, diharapkan distribusi pembangunan dapat lebih merata dan kualitas layanan kepada masyarakat semakin optimal.

Pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pelayanan, penguatan demokrasi, serta pengelolaan potensi ekonomi dan sosial yang lebih efektif. Namun, meskipun pemekaran wilayah sering kali dipandang sebagai jalan menuju kemajuan, dalam implementasinya kebijakan ini tidak jarang menghadirkan permasalahan baru, terutama terkait dengan ketimpangan spasial yang timbul akibat perbedaan dalam pembangunan antarwilayah.

Ketimpangan spasial, baik di tingkat regional maupun lokal, menjadi fenomena yang nyata pasca pemekaran wilayah. Analisis ketimpangan spasial menunjukkan adanya disparitas yang cukup besar antara daerah maju dan daerah tertinggal, baik dalam hal akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, hingga kualitas hidup masyarakat (Turok et al., 2017). Di Indonesia, ketimpangan ini sering kali muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya, baik dari segi fiskal, pembangunan infrastruktur, maupun distribusi ekonomi yang tidak merata (Firdaus et al., 2020). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada kesiapan aparatur pemerintah dan kapasitas daerah untuk mengelola sumber daya dengan efektif (Bappenas, 2021).

Kabupaten Bekasi merupakan pusat industri strategis yang berperan penting dalam ekonomi nasional, dengan sektor industri menyumbang lebih dari 60% PDRB (Produk Domestik Regional

Bruto) yang telah mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang di suatu daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di masa yang akan datang pada kabupaten ini (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, 2023). Kawasan Cikarang yang menjadi episentrum industri memiliki infrastruktur dan akses pelayanan publik yang memadai, berbeda jauh dengan wilayah selatan dan timur seperti Bojongmangu, Sukawangi, dan Babelan. Ketimpangan ruang ini tercermin dalam data akses sanitasi yang hanya mencapai 48% di wilayah tertinggal, dibandingkan 87% di wilayah maju (Bappeda Kabupaten Bekasi, 2022).

Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga pada penggunaan lahan dan sektor ekonomi di Kabupaten Bekasi. Banyak lahan yang digunakan untuk kawasan industri, terutama di wilayah utara, yang berdampak pada alih fungsi lahan dan perubahan sektor mata pencaharian penduduk. Penelitian oleh Nur (2016) menunjukkan bahwa perbedaan penggunaan lahan antara wilayah utara dan selatan Kabupaten Bekasi mempengaruhi struktur sosial-ekonomi masyarakat, dengan wilayah utara lebih terfokus pada sektor industri, sementara wilayah selatan masih bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan lokal.

Pemekaran wilayah, meskipun diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ini dengan mendekatkan pelayanan publik, ternyata membawa tantangan baru. Rondinelli dan Cheema (1983) menyatakan bahwa keberhasilan pemekaran wilayah sangat bergantung pada kapasitas fiskal dan perencanaan yang matang. Sementara Firman (2009) menyoroti bahwa pemekaran yang tidak disertai dengan perencanaan yang tepat dapat memicu konflik sosial dan ketergantungan fiskal antar wilayah yang baru terbentuk.

Masalah ketimpangan pembangunan ruang ini menjadi semakin kompleks seiring dengan urbanisasi yang pesat di Kabupaten Bekasi. Fenomena ini tercermin dalam perbedaan akses terhadap fasilitas publik, kualitas lingkungan hidup, dan tingkat kesejahteraan antara wilayah-wilayah dalam satu kawasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang strategi efektif yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketimpangan ruang di Kabupaten Bekasi, dengan fokus pada upaya perencanaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan guna menciptakan keseimbangan pembangunan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi yang relevan dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan terkait topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, studi literatur bertujuan untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai konsep pemekaran wilayah, ketimpangan spasial, dan dampaknya terhadap pembangunan wilayah, khususnya di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai literatur yang relevan mengenai pemekaran wilayah, ketimpangan ruang, serta teori-teori pembangunan daerah yang bisa menjelaskan fenomena ketimpangan yang terjadi pasca pemekaran wilayah (Torraco, 2005; Torres et al, 2018).

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang relevan dengan topik pemekaran wilayah dan ketimpangan spasial, melalui pencarian di berbagai database jurnal seperti Google Scholar, Scopus, JSTOR, dan laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta lembaga pemerintah terkait. Setelah menemukan berbagai sumber, peneliti akan menyeleksi literatur berdasarkan kriteria relevansi dan kualitasnya. Literatur yang dipilih akan dianalisis untuk memahami temuan-temuan penting, teori-teori utama, serta kesenjangan penelitian yang ada. Analisis ini akan mencakup berbagai aspek, seperti ketimpangan dalam akses layanan dasar, infrastruktur, dan sektor ekonomi di daerah yang telah mengalami pemekaran.

Selanjutnya, peneliti akan mensintesis temuan-temuan utama dari berbagai literatur yang ada, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai ketimpangan ruang yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Sintesis ini akan mencakup perbandingan antara wilayah utara yang lebih berkembang dengan wilayah selatan yang masih tertinggal, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan disparitas tersebut, seperti alokasi sumber daya, penggunaan lahan, dan struktur sosial-ekonomi. Dari sintesis ini, peneliti akan mengembangkan kerangka teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis lebih dalam dampak pemekaran wilayah terhadap ketimpangan ruang, dengan fokus pada Kabupaten Bekasi.

Metode studi literatur ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai dampak pemekaran wilayah terhadap ketimpangan spasial, serta merumuskan

strategi dan rekomendasi yang lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan ruang di Kabupaten Bekasi. Kesimpulan dari studi literatur ini akan memberikan wawasan yang dapat digunakan dalam perencanaan wilayah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan pembangunan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bekasi sendiri merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang sangat cepat dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh pembangunan kawasan industri, perumahan, dan pusat perbelanjaan yang masif. Namun, pertumbuhan yang tidak merata ini telah menimbulkan ketimpangan pembangunan yang cukup signifikan antara wilayah utara dan selatan Kabupaten Bekasi. Bekasi Utara umumnya dianggap sebagai kawasan yang lebih berkembang dengan adanya kawasan industri yang besar, pusat perbelanjaan modern, dan infrastruktur yang lebih baik. Sebaliknya, Bekasi Selatan cenderung lebih bersifat agraris dengan pertumbuhan yang lebih lambat dan akses terhadap fasilitas publik yang terbatas.

Ketimpangan pembangunan ruang antara Bekasi Utara dan Bekasi Selatan ini memiliki implikasi yang luas, antara lain:

1. Kesenjangan sosial: Perbedaan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang berkualitas dapat menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan.
2. Ketidakstabilan sosial: Ketimpangan yang terlalu besar dapat memicu konflik sosial dan ketidakpuasan masyarakat.
3. Inefisiensi ekonomi: Ketimpangan pembangunan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena tidak semua wilayah dapat berkontribusi secara optimal.
4. Kerusakan lingkungan: Pertumbuhan yang tidak terkendali di Bekasi Utara dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti pencemaran air dan udara.
5. Dampak Sosio-Ekonomi: Ketimpangan ini berdampak langsung pada aspek sosio-ekonomi, termasuk peluang kerja, kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Warga di

Bekasi Utara mungkin menghadapi lebih banyak tantangan dalam mengakses fasilitas-fasilitas ini dibandingkan dengan mereka yang tinggal di Bekasi Selatan (Smith, 2021).

6. Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah solusi untuk mempercepat proses pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat di daerah.(Wahyuningsih et al., 2020)

Ketimpangan pembangunan ini dapat dijelaskan melalui teori inti-periferi oleh Friedmann (1966), yang menguraikan bahwa pembangunan cenderung terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu (inti) yang memiliki akses lebih baik terhadap infrastruktur, sumber daya, dan investasi. Wilayah periferi, seperti Bekasi Selatan, seringkali tertinggal karena kurangnya akses terhadap faktor-faktor pendukung pembangunan tersebut. Studi lain oleh Dewi (2019) menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan ruang juga sering dipicu oleh ketidakseimbangan alokasi anggaran antara wilayah maju dan tertinggal, seperti yang juga terjadi di Kabupaten Bekasi.



Gambar 1. Pemekaran Kabupaten Bekasi

Wacana pemekaran Kabupaten Bekasi Utara semakin menguat, dengan rencana melibatkan 13 kecamatan untuk membentuk kabupaten baru. Ide ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi Utara yang diusulkan meliputi 13 kecamatan, yaitu Muara Gembong, Cabang Bungin, Suka Karya, Pebayuran, Karang Bahagia, Sukatani, Cibitung, Tambun Selatan, Tambun Utara, Tambelang, Sukawangi, Babelan, dan Tarumajaya.

Rencananya, ibukota kabupaten Bekasi Utara ini akan ditempatkan di Kecamatan Tambelang, sebuah wilayah yang strategis dan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pemerintahan yang baru. Wilayah ini memiliki luas sekitar Dengan luas wilayah mencapai 781 km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.867.649 jiwa per 31 Desember 2023, pemekaran ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas administrasi dan distribusi sumber daya. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan perekonomian di kawasan tersebut.

Rencana pemekaran wilayah ini dapat dianalisis menggunakan teori desentralisasi oleh Rondinelli (1981), yang menyatakan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik, terutama di daerah-daerah dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar. Penelitian yang dilakukan oleh Suhartini dan Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa pemekaran wilayah sering kali berhasil meningkatkan pemerataan pembangunan melalui pendekatan yang lebih lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah. Dengan memekarkan Kabupaten Bekasi Utara, diharapkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat lebih merata.

Pemekaran wilayah ini diusulkan sebagai solusi untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada, seperti kemacetan, pertumbuhan penduduk yang pesat, dan kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih merata. Dengan pembentukan Kabupaten Bekasi Utara, diharapkan pemerintahan akan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan dan pembangunan menjadi lebih terfokus serta terarah. Sutrisno, seorang tokoh masyarakat dari Kecamatan Tambelang, mengungkapkan bahwa pemekaran ini merupakan aspirasi yang mulai disuarakan oleh warga "Kami berharap dengan adanya kabupaten baru ini, pembangunan di wilayah utara Bekasi dapat lebih merata dan pelayanan publik dapat lebih baik," ujarnya.

1. Ketimpangan Ruang di Kabupaten Bekasi

Analisis data menunjukkan adanya ketimpangan signifikan antara wilayah maju dan tertinggal di Kabupaten Bekasi. Beberapa indikator utama meliputi:

Tabel 1. Ketimpangan antar wilayah di kabupaten bekasi

Indikator	Wilayah Maju (Cikarang & Tambun)	Wilayah Tertinggal (Babelan & Bojongmangu)
PDRB Per Kapita (Rp juta)	120	45
Akses Sanitasi Layak (%)	87	48
Panjang Jalan Beraspal (km/km ²)	4.2	1.5

Tabel di atas menjelaskan bahwa Cikarang & Tambun sebagai wilayah maju memiliki keunggulan yang signifikan dalam hal ekonomi, kualitas sanitasi, dan infrastruktur jalan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah maju memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya dan fasilitas yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Data yang ditampilkan dalam tabel ini mencerminkan disparitas yang signifikan antara wilayah maju dan tertinggal. Hal ini sejalan dengan teori disparitas regional yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2012), yang menyoroti bahwa wilayah maju cenderung mendapatkan lebih banyak manfaat dari investasi pemerintah dan swasta dibandingkan wilayah tertinggal.

Studi oleh Wibowo (2019) juga menunjukkan bahwa ketimpangan infrastruktur jalan dan sanitasi dapat menjadi penghambat utama bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah tertinggal seperti Babelan dan Bojongmangu. Oleh karena itu, intervensi khusus diperlukan untuk mengatasi disparitas ini, termasuk redistribusi anggaran pembangunan. Perbedaan ini diperkuat oleh dominasi kawasan industri di utara, yang menarik investasi dan alokasi anggaran lebih besar. Wilayah tertinggal menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar dan ketergantungan ekonomi pada wilayah industri.

2. Pemekaran Wilayah Sebagai Solusi

Pemekaran wilayah sering kali dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan ruang dan memajukan daerah yang tertinggal. Namun, meskipun ada potensi yang besar, pemekaran wilayah juga membawa sejumlah tantangan yang harus dikelola dengan hati-hati. Pemekaran wilayah telah terbukti efektif dalam beberapa kasus di Indonesia, seperti pemekaran Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Timur, yang menunjukkan peningkatan

akses terhadap fasilitas publik di wilayah yang dimekarkan (Wibowo & Munir, 2019). Selain itu, teori pembangunan berbasis lokal oleh Putnam (1993) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik dan rasa memiliki terhadap pembangunan. Dalam konteks Bekasi Utara, pemekaran ini dapat memaksimalkan potensi sumber daya lokal, mengurangi beban administrasi pemerintah daerah induk, dan mempercepat pemerataan pembangunan. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang potensi dan tantangan dari pemekaran wilayah:

1. **Efisiensi Pelayanan Publik:** Pemekaran wilayah dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik karena pemerintah daerah baru lebih fokus pada kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintah daerah yang lebih kecil dan terdesentralisasi bisa lebih responsif terhadap masalah yang dihadapi masyarakatnya, sehingga layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bisa lebih tepat sasaran.
2. **Peningkatan Infrastruktur:** Salah satu manfaat utama pemekaran wilayah adalah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah yang baru. Pemekaran memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk fokus pada pembangunan jalan, jaringan listrik, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, yang seringkali tertinggal di wilayah yang lebih besar. Dengan adanya anggaran dan kebijakan yang lebih terfokus pada wilayah baru, diharapkan pemerataan pembangunan dapat tercapai.
3. **Pemberdayaan Lokal:** Pemekaran wilayah juga memberi kesempatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat di wilayah baru dapat lebih terlibat dalam proses politik dan administratif, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan wilayahnya.

Meskipun memiliki banyak potensi, pemekaran wilayah juga menghadapi berbagai tantangan yang signifikan:

1. **Kesiapan Fiskal:** Wilayah yang baru dibentuk memerlukan sumber daya finansial yang besar untuk membangun infrastruktur pemerintahan, termasuk pembangunan kantor pemerintahan, sistem administrasi, dan fasilitas umum. Kesiapan fiskal daerah baru seringkali menjadi tantangan utama, terutama jika daerah tersebut belum memiliki sumber daya

ekonomi yang memadai. Tanpa dukungan fiskal yang cukup, wilayah baru bisa kesulitan dalam mengelola pembangunan jangka panjang.

2. Konflik Sosial: Proses pemekaran sering kali melibatkan pembagian aset dan alokasi sumber daya, yang bisa memicu ketegangan sosial antara wilayah yang baru terbentuk dan wilayah lama. Pembagian wilayah administratif, pembagian anggaran, serta kontrol terhadap sumber daya alam dan ekonomi bisa menyebabkan konflik, baik antar pemerintah daerah maupun antara masyarakat di kedua wilayah. Konflik ini dapat mengganggu stabilitas dan merugikan tujuan utama pemekaran, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kompleksitas Birokrasi: Salah satu tantangan besar dalam pemekaran wilayah adalah masalah koordinasi antara wilayah lama dan wilayah baru. Proses birokrasi yang rumit, baik dalam hal administrasi pemerintahan, pembagian wewenang, serta sinkronisasi kebijakan, sering kali menghambat kelancaran proses pemekaran. Pemisahan fungsi-fungsi pemerintahan dan pengelolaan sumber daya dapat menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang diambil di kedua wilayah tersebut.

Meskipun pemekaran membawa banyak potensi, tantangan-tantangan seperti konflik sosial harus ditangani dengan hati-hati. Kusumaningrum (2020) mencatat bahwa pemekaran sering kali memicu perdebatan tentang alokasi sumber daya, yang dapat memengaruhi stabilitas sosial. Selain itu, penelitian oleh Harahap et al. (2018) menunjukkan bahwa kesiapan fiskal merupakan kunci keberhasilan pemekaran, di mana daerah baru memerlukan perencanaan anggaran yang matang agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan tanpa ketergantungan berlebihan pada pemerintah pusat. Dengan pendekatan yang terintegrasi, tantangan ini dapat diminimalkan untuk memastikan keberhasilan pemekaran wilayah.

PENUTUP

Pemekaran wilayah dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi ketimpangan ruang di Kabupaten Bekasi, namun harus didukung oleh perencanaan matang dan kesiapan fiskal yang kuat. Pemekaran wilayah di Kabupaten Bekasi bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah maju (Cikarang dan Tambun) dan wilayah tertinggal (Babelan dan Bojongmangu). Pemekaran

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memberdayakan masyarakat lokal.

Namun, tantangan seperti kesiapan fiskal, potensi konflik sosial, dan kompleksitas birokrasi menjadi hambatan yang perlu diatasi. Meskipun pemekaran dapat memperbaiki kesenjangan antara wilayah utara yang lebih maju dan wilayah selatan yang tertinggal, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang baik. Dengan pendekatan yang tepat, pemekaran dapat menciptakan pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kabupaten Bekasi.

Beberapa rekomendasi untuk mengatasi ketimpangan ruang pasca pemekaran wilayah di Kabupaten Bekasi perlu diperhatikan. Peningkatan Alokasi Anggaran: Wilayah tertinggal harus mendapatkan prioritas sebelum pemekaran. Penguatan SDM Lokal: Pelatihan intensif bagi aparatur pemerintahan di wilayah baru. Konsultasi Publik: Melibatkan masyarakat lokal untuk mengurangi resistensi sosial. Studi Kelayakan: Menggunakan indikator ketimpangan (IPM, sanitasi, jalan) untuk menilai potensi pemekaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kebijakan Fiskal. (2013). *Untungnya Pemekaran Daerah: Dampak Pemekaran terhadap Pelayanan Publik*. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. (2023). *Statistik Wilayah Bekasi 2023*.
- Bappeda Kabupaten Bekasi. (2022). *Laporan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bekasi*.
- Bappenas. (2021). *Kajian Strategis Pemekaran Wilayah dan Dampaknya terhadap Pembangunan Daerah*. Diakses dari <https://bappenas.go.id>.
- Dewi, M. E. (2019). Ketimpangan pembangunan antarwilayah: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 35(2), 120-133.
- Firdaus, M., Salim, M. D., & Sinaga, B. M. (2020). Disparitas pembangunan antarwilayah di Indonesia: Sebuah kajian empiris. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(1), 32-42.
- Firman, T. (2009). "Decentralization reform and local government proliferation in Indonesia: Towards a fragmentation of regional development". *Review of Urban & Regional Development Studies*, 21(2).

- Friedmann, J. (1966). Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela.
- Harahap, S., Setiawan, D., & Rahmawati, Y. (2018). Kesiapan fiskal dalam mendukung pemekaran daerah otonomi baru di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 65-77.
- Kusumaningrum, R. (2020). Konflik sosial dalam proses pemekaran wilayah: Studi kasus di Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 24(4), 45-62
- Nur, D. M. (2016). Dampak Pembangunan Kawasan Industri Di Kabupaten Bekasi Terhadap Alih Fungsi Lahan Dan Mata Pencarian Penduduk. *Jurnal Geografi Gea*, 7(2). <https://doi.org/10.17509/gea.v7i2.1717>
- Ombudsman RI. (2024). *Hasil Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik*. Diakses dari <https://jatim.bpk.go.id>
- Rondinelli, D.A., & Cheema, G.S. (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*.
- Smith, J. (2021). Urbanisasi dan Ketimpangan Sosial: Analisis Terhadap Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 9(1), 45-59.
- Suhartini, E., & Kurniawan, H. (2021). Analisis keberhasilan pemekaran wilayah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 45-58.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development* (11th ed.). Pearson.
- Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human resource development review*, 4(3), 356-367.
- Torres-Carrión, P. V., González-González, C. S., Aciar, S., & Rodríguez-Morales, G. (2018, April). Methodology for systematic literature review applied to engineering and education. In *2018 IEEE Global engineering education conference (EDUCON)* (pp. 1364-1373). IEEE.
- Turok, I., Scheba, A., & Visagie, J. (2017). Reducing spatial inequalities through better regulation.
- Wahyuningsih, D., Qodir, Z., & Syarifuddin, T. I. (2020). Dinamika Pemekaran Wilayah Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat. *Journal of Government Science (GovSci)*, 1(2), 64–83. <https://doi.org/10.54144/govsci.v1i2.7>
- Wibowo, R. (2019). Ketimpangan pembangunan di wilayah Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 25(3), 100-112.